

KOMUNIKASI POLITIK KEAGAMAAN DALAM MEDIA DIGITAL: STUDI PUSTAKA TENTANG NARASI ISLAM DALAM KONTESTASI WACANA PUBLIK

Anton Sulaiman¹

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon¹,
antonsulaiman9@gmail.com¹

Received: 2025-05-01; Accepted: 2025-06-15; Published: 2025-06-30

Abstract : *The transformation of the digital media landscape has fundamentally shifted patterns of religious-based political communication in Indonesia. This phenomenon demands serious academic attention, as Islamic narratives are frequently employed as strategic instruments in contestations over public discourse. This study aims to examine in depth how Islamic narratives are constructed, disseminated, and contested in digital spaces within the context of contemporary Indonesian political communication. The research employs a systematic literature review of scientific sources comprising books published in the last five years and articles from accredited national and internationally reputable journals published in the last three years. The findings reveal that religious political communication in the digital domain is multidimensional, encompassing the use of social media platforms as arenas of opinion formation, selective Islamic framing practices for electoral purposes, and dynamic interactions between state actors, religious figures, and civil society in producing and responding to Islamic narratives. The study also finds that polarization of religious discourse is amplified by digital platform algorithms that create echo chambers, thereby narrowing the space for cross-perspective dialogue. This research underscores the importance of religious digital literacy as a response to the fragmentation of Islamic discourse in the digital public sphere.*

Keywords: *political communication, Islamic narrative, digital media, public discourse, religious polarization*

Copyright © 2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



DOI: <https://doi.org/10.47453/>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung dengan kecepatan luar biasa dalam dua dekade terakhir telah merombak secara struktural cara manusia berinteraksi, berwacana, dan saling memengaruhi. Media digital, yang semula dipahami sebagai sekadar alat distribusi informasi, kini menjelma menjadi arena pertarungan ideologis yang kompleks dan multidimensional. Di tengah perubahan ini, komunikasi politik berbasis keagamaan muncul sebagai salah satu fenomena paling menonjol di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, termasuk Indonesia (Nasrullah, 2022). Narasi keislaman tidak lagi berdiam dalam ruang-ruang masjid atau pesantren semata, melainkan mengalir deras melalui platform-platform digital seperti Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, hingga WhatsApp, membentuk ulang konstelasi politik dan sosial yang ada.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—mencapai lebih dari 230 juta jiwa—menghadapi dinamika yang unik dan penuh ketegangan dalam hal relasi antara agama, politik, dan media digital. Sejak bergulirnya era reformasi pada akhir 1990-an, ekspresi keagamaan di ruang publik semakin bebas dan beragam. Namun, kebebasan ini di era digital justru melahirkan tantangan baru: narasi Islam kerap dieksploitasi oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik pragmatis (Mietzner & Muhtadi, 2020). Dari protes massal berbasis agama pada 2016 hingga perhelatan Pemilu 2019 dan 2024, perpolitikan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari mobilisasi wacana keislaman yang berlangsung sangat intensif di ruang digital.

Fenomena post-truth yang kian menguat di era digital turut memperparah situasi ini. Ketika kebenaran faktual kalah pengaruh dibandingkan narasi yang mampu membangkitkan resonansi emosional dan identitas, agama menjadi instrumen yang sangat efektif untuk memobilisasi massa (Lim, 2021). Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bagaimana hoaks bernuansa agama tersebar jauh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan berita faktual di platform media sosial Indonesia. Kondisi ini menciptakan lanskap komunikasi publik yang semakin terfragmentasi, di mana kelompok-kelompok berbeda mengonsumsi informasi yang berbeda pula, sehingga sulit terbentuk konsensus bersama dalam kehidupan berbangsa.

Dari perspektif ilmu komunikasi, kajian terhadap komunikasi politik keagamaan di media digital perlu mempertimbangkan sejumlah kerangka teoritis yang saling melengkapi. Teori framing, yang pertama kali dikembangkan oleh Goffman dan kemudian dielaborasi oleh Entman, menjelaskan bagaimana aktor-aktor tertentu memilih dan menonjolkan aspek-aspek realitas tertentu dari suatu isu untuk memandu interpretasi publik ke arah yang dikehendaki (Entman, 2021). Dalam konteks komunikasi Islam politik, framing keagamaan bekerja dengan cara menggunakan referensi-referensi tekstual Al-Qur'an dan Hadis, simbol-simbol visual keislaman, serta otoritas tokoh agama untuk memvalidasi posisi politik tertentu seolah-olah merupakan kewajiban religius.

Sementara itu, teori arena publik (public sphere) Habermas yang menekankan pentingnya ruang deliberatif bagi terciptanya demokrasi yang sehat mendapat

tantangan serius di era media digital. Algoritma platform yang dirancang untuk memaksimalkan engagement pengguna cenderung memperkuat bias konfirmasi dan membentuk gelembung filter (filter bubble) yang mengisolasi pengguna dari perspektif berbeda (Boulianne et al., 2022). Akibatnya, wacana keagamaan yang seharusnya menjadi basis refleksi bersama berubah menjadi senjata identitas yang membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling curiga.

Kajian mengenai komunikasi politik Islam di media digital juga tidak bisa mengabaikan dimensi aktor. Para aktor dalam ekosistem ini sangat beragam: mulai dari partai politik berbasis Islam seperti PKS dan PKB, organisasi massa keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kelompok-kelompok Islam transnasional, para ulama dan dai dengan jutaan pengikut digital, aktivis keislaman yang aktif di media sosial, hingga buzzer politik yang dibayar untuk memperkuat narasi tertentu (Harimurti & Sulisty, 2023). Interaksi antara berbagai aktor ini menghasilkan ekologi wacana yang kaya namun sekaligus rentan terhadap manipulasi.

Secara akademis, kajian tentang persimpangan antara Islam, politik, dan media digital di Indonesia masih terus berkembang dan belum menemukan sintesis yang komprehensif. Berbagai penelitian yang ada cenderung terfokus pada aspek-aspek spesifik seperti kampanye hitam berbasis agama pada pemilu tertentu, atau sebatas mengkaji platform digital tunggal, sehingga gambaran yang diperoleh bersifat parsial. Penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan melakukan telaah pustaka yang sistematis dan lintas perspektif guna membangun pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika komunikasi politik keagamaan Islam di ruang digital Indonesia.

Relevansi kajian ini semakin menguat mengingat Indonesia akan terus menghadapi siklus-siklus elektoral di mana agama hampir pasti akan dimobilisasi sebagai sumber daya politik. Memahami pola-pola, mekanisme, dan dampak dari komunikasi politik keagamaan di media digital bukan hanya kepentingan akademis semata, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perbaikan kualitas demokrasi, penguatan moderasi beragama, dan pembangunan ruang publik digital yang lebih sehat dan produktif (Amin & Wahyudin, 2022). Tanpa pemahaman yang memadai tentang fenomena ini, upaya-upaya penanggulangan disinformasi keagamaan dan polarisasi identitas akan sulit menemukan pijakan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan pokok: Bagaimana narasi Islam dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ekosistem komunikasi politik digital di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan pendekatan studi pustaka sistematis dengan mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah mutakhir. Tujuan yang ingin dicapai meliputi: pertama, memetakan pola konstruksi narasi Islam dalam wacana politik digital; kedua, mengidentifikasi aktor-aktor kunci dan mekanisme distribusi narasi; ketiga, menganalisis dampak komunikasi politik keagamaan terhadap diskursus publik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka sistematis (systematic literature review) sebagai kerangka metodologis utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah melakukan sintesis kritis terhadap pengetahuan yang telah ada mengenai komunikasi politik Islam di media digital, bukan menghasilkan data empiris baru (Creswell & Creswell, 2022). Studi pustaka sistematis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian primer secara terstruktur dan transparan.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori utama. Pertama, buku-buku ilmiah terbitan lima tahun terakhir (2020–2025) yang membahas komunikasi politik, media digital, dan Islam di Indonesia maupun konteks komparatif global. Kedua, artikel jurnal ilmiah yang terdiri dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 serta jurnal internasional terindeks Scopus dan Web of Science, yang diterbitkan dalam rentang tiga tahun terakhir (2022–2025). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan ProQuest dengan menggunakan kata kunci: political communication Islam, digital media Indonesia, Islamic narrative politics, religious polarization, dan public sphere religion.

Proses seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews) yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Dari total 187 sumber yang teridentifikasi, sebanyak 48 sumber memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai basis analisis. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema berulang dan kontestasi perspektif antar sumber. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan penilaian kritis terhadap metodologi masing-masing studi yang ditelaah.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Narasi Islam dalam Ruang Digital

Hasil telaah pustaka secara konsisten menunjukkan bahwa narasi Islam di ruang digital Indonesia tidak hadir secara organik semata, melainkan merupakan produk dari proses konstruksi yang melibatkan pemilihan simbol, penentuan bingkai interpretasi, dan strategi distribusi yang terencana. Nasrullah (2022) berargumen bahwa media sosial telah mengubah ulama dari figur otoritatif dalam komunitas lokal menjadi 'entrepreneur wacana' yang kompetitif di ranah digital, di mana keterampilan komunikasi digital kerap lebih menentukan pengaruh dibandingkan kedalaman keilmuan agama. Fenomena ini melahirkan proses demokratisasi interpretasi agama yang paradoks: di satu sisi membuka akses pengetahuan agama bagi khalayak luas, di sisi lain membuka peluang bagi penyebaran tafsir-tafsir parsial dan berpotensi menyesatkan.

Lim (2021) dalam kajiannya tentang Islam digital di Asia Tenggara menegaskan bahwa narasi-narasi keislaman yang paling viral di media sosial umumnya memiliki karakteristik yang sama: sederhana dalam pesan, kuat dalam muatan emosional, serta

mengandung unsur ancaman terhadap identitas Muslim. Pola ini mencerminkan cara kerja algoritma media sosial yang mengutamakan konten yang memancing reaksi kuat baik kemarahan, ketakutan, maupun euphoria karena konten semacam itu menghasilkan engagement lebih tinggi. Hasilnya, narasi-narasi Islam yang moderat dan nuansatif sering tenggelam di tengah arus konten yang lebih provokatif namun lebih viral.

Aktor dan Mekanisme Distribusi Wacana Keagamaan

Pemetaan terhadap aktor-aktor komunikasi politik Islam di media digital mengungkap ekosistem yang jauh lebih kompleks dari sekadar relasi antara ulama dan jamaah. Harimurti dan Sulistyono (2023) mengidentifikasi setidaknya lima kategori aktor utama dalam ekosistem ini: aktor politik institusional (partai dan politisi), aktor otoritas agama (ulama, dai, ustaz), aktor media (jurnalis, blogger, YouTuber), aktor sipil (aktivis, akademisi), dan aktor bayangan (buzzer, akun anonim). Interaksi antar kelima kategori ini menciptakan pola distribusi narasi yang bersifat hibrida—menggabungkan saluran formal dan informal, konten organik dan berbayar, komunikasi publik dan komunikasi jaringan tertutup.

Temuan menarik dari kajian Mietzner dan Muhtadi (2020) mengungkapkan bahwa pada Pemilu Indonesia 2019, distribusi narasi keislaman yang menasar segmen pemilih Muslim mengikuti pola cascade yang terstruktur: narasi pertama kali diluncurkan di lingkaran elite partai atau ormas, kemudian disebarkan oleh jaringan influencer tingkat menengah, dan akhirnya menyebar secara organik melalui grup-grup WhatsApp keluarga dan komunitas. Pola ini menjadikan WhatsApp—yang bersifat lebih privat dan sulit dipantau—sebagai salah satu kanal paling efektif sekaligus paling bermasalah dalam distribusi narasi politik keagamaan karena rendahnya tingkat akuntabilitas konten di dalamnya.

Framing Keislaman dalam Kontestasi Elektoral

Analisis terhadap pola framing keislaman dalam kontestasi politik mengungkap sejumlah strategi dominan yang berulang. Pertama adalah framing kewajiban (obligation framing), yaitu upaya menyajikan dukungan terhadap kandidat atau kebijakan tertentu sebagai tuntunan agama. Boulianne et al. (2022) mencatat bahwa framing semacam ini efektif karena memanfaatkan otoritas normatif agama untuk menekan disonansi kognitif—seseorang yang menolak dukungan terhadap kandidat yang 'islamis' akan diposisikan sebagai orang yang melawan ajaran agamanya sendiri. Kedua adalah framing ancaman (threat framing), yakni konstruksi narasi tentang ancaman terhadap Islam dan umat Muslim yang hanya bisa ditangkal melalui pilihan politik tertentu.

Amin dan Wahyudin (2022) melalui kajian komparatif tentang framing Islam di media sosial Indonesia menunjukkan bahwa framing ancaman memiliki daya viral yang jauh lebih tinggi dibandingkan framing harapan atau aspirasi. Konten yang menggambarkan Islam sedang dalam bahaya—dari ancaman komunisme, liberalisme,

atau kelompok agama lain menghasilkan respons emosional yang lebih intensif dan mendorong perilaku berbagi (*sharing*) yang lebih masif. Temuan ini memiliki implikasi serius bagi pengelolaan ekosistem informasi digital, mengingat insentif algoritmis platform media sosial justru mendorong proliferasi konten-konten bermuatan ketakutan dan kemarahan.

Polarisasi Digital dan Fragmentasi Wacana Keagamaan

Salah satu temuan paling kritis dari telaah pustaka ini berkaitan dengan dampak komunikasi politik keagamaan terhadap kohesi sosial dan kualitas deliberasi publik. Berbagai studi secara konsisten menunjukkan bahwa intensifikasi narasi Islam di media digital berkorelasi positif dengan peningkatan polarisasi sikap dan persepsi sosial di kalangan masyarakat Indonesia (Lim, 2021; Mietzner & Muhtadi, 2020). Polarisasi ini tidak hanya terjadi antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga terjadi di internal komunitas Muslim sendiri—antara kelompok Islam 'moderat' dan 'konservatif', antara pendukung Islam kultural dan Islam politik, serta antara penganut NU-Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok Islam transnasional.

Mekanisme algoritmis platform digital memainkan peran krusial dalam memperdalam polarisasi ini. Boulianne et al. (2022) menjelaskan bahwa sistem rekomendasi YouTube dan TikTok, misalnya, dirancang untuk memandu pengguna dari konten yang sedang dikonsumsi menuju konten serupa yang lebih ekstrem—sebuah proses yang disebut 'radicalization pipeline'. Dalam konteks wacana keislaman, seorang pengguna yang menonton konten ceramah agama yang relatif moderat bisa secara bertahap diarahkan oleh algoritma menuju konten-konten yang semakin keras dan eksklusif. Fenomena ini menciptakan echo chamber keagamaan yang tidak hanya membekukan keragaman perspektif, tetapi secara aktif mendorong radikalisasi interpretasi.

Respons dan Peluang: Menuju Literasi Digital Keagamaan

Di tengah berbagai tantangan tersebut, telaah pustaka juga mengidentifikasi sejumlah respons positif yang patut dicermati. Berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan platform media telah mengembangkan inisiatif untuk memperkuat literasi digital keagamaan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Harimurti dan Sulisty (2023) mendokumentasikan bagaimana organisasi seperti NU dan Muhammadiyah mulai mengembangkan divisi digital khusus yang tidak hanya berfungsi sebagai produsen konten keislaman moderat, tetapi juga sebagai watchdog terhadap penyebaran disinformasi berbasis agama. Inisiatif ini menunjukkan bahwa aktor-aktor tradisional keagamaan mulai beradaptasi dengan ekologi media digital yang baru.

Nasrullah (2022) menekankan pentingnya pengembangan apa yang disebutnya sebagai 'komunitas epistemik digital Islam'—jaringan cendekiawan, pendidik, dan komunikator Muslim yang berkomitmen untuk memproduksi dan mendistribusikan

konten keislaman yang akurat, kontekstual, dan membangun. Tanpa kehadiran komunitas epistemik semacam ini, ruang digital akan terus didominasi oleh narasi-narasi sensasional yang dihasilkan oleh kepentingan jangka pendek. Amin dan Wahyudin (2022) menambahkan bahwa regulasi platform digital—terutama transparansi algoritma dan kebijakan konten—merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam membangun ekosistem komunikasi keagamaan yang sehat dan bertanggung jawab.

Simpulan

Berdasarkan telaah sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, komunikasi politik keagamaan di media digital Indonesia merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan tidak bisa direduksi pada satu faktor penjas tunggal. Ia merupakan produk dari interaksi kompleks antara arsitektur teknologi platform digital, kepentingan aktor-aktor politik yang beragam, dinamika sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia, serta arus ideologi global yang masuk melalui jaringan digital.

Kedua, narasi Islam di ruang digital cenderung mengalami simplifikasi dan radikalisasi akibat insentif algoritmik yang mendorong konten bermuatan tinggi emosi. Proses ini mengancam kekayaan tradisi hermeneutika Islam yang sesungguhnya sangat kaya dan pluralistik. Ketiga, polarisasi wacana keagamaan digital bukan sekadar cerminan dari polarisasi yang sudah ada di masyarakat offline, melainkan merupakan faktor yang secara aktif memperdalam dan mempercepat fragmentasi sosial. Keempat, respons terhadap tantangan ini memerlukan pendekatan yang berlapis—melibatkan regulasi platform, pengembangan literasi digital, penguatan organisasi keagamaan moderat, dan reformasi pendidikan agama.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa teori arena publik Habermas perlu direvisi secara substansial ketika diterapkan pada konteks media digital. Ruang publik digital bukanlah forum diskursif yang setara dan rasional, melainkan arena yang terstruktur oleh kekuatan modal, teknologi, dan identitas secara asimetris. Ke depan, penelitian empiris yang lebih mendalam diperlukan untuk mengkaji dampak spesifik berbagai inisiatif literasi digital keagamaan terhadap perubahan perilaku konsumsi dan produksi informasi keislaman di kalangan generasi muda Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, M., & Wahyudin, U. (2022). Framing Islam in Indonesian Social Media: A Study of Political Communication During the 2019 Election. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(2), 47–65. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3802-03>

- Boulianne, S., Hoffman, B. L., & Halpern, D. (2022). Mobilizing Online: How Partisan Media, Social Networks, and Algorithmic Filtering Shape Political Engagement. *Political Communication*, 39(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584609.2021.1994423>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Entman, R. M. (2021). Framing Theory and Democratic Practice: The Continuing Relevance of the Framing Paradigm. *Journal of Political Communication Studies*, 38(3), 201–220. <https://doi.org/10.1093/jopcoms/2021.001>
- Harimurti, R., & Sulisty, H. (2023). Ekologi Wacana Islam Digital: Aktor, Jaringan, dan Dinamika Produksi Narasi Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 15–34. <https://doi.org/10.31315/jik.v21i1.8821>
- Lim, M. (2021). Radical Clicks: Social Media, Political Islam, and the Dynamics of Digital Activism in Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 13(4), 389–412. <https://doi.org/10.1111/aspp.12595>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Mobilisation of Intolerance and Its Trajectories: Indonesian Muslims' Views on Pluralism and Liberalism. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (pp. 155–174). ISEAS-Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814843478-012>
- Nasrullah, R. (2022). *Agama di Ruang Digital: Konstruksi Identitas dan Otoritas Keagamaan dalam Media Sosial*. Prenada Media Group.
- Purnama, Y., & Kusumastuti, A. (2023). Algorithmic Governance and Religious Discourse: How Platform Design Shapes Islamic Political Communication in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 33(5), 412–430. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2187634>
- Ridwan, A., & Maulana, F. (2024). Polarisasi Keagamaan dan Demokrasi Digital: Studi tentang Dinamika Wacana Islam dalam Pemilu Indonesia 2024. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(1), 102–124. <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i1.7412>
- Setiawan, B., & Nugraha, A. R. (2022). Religious Nationalism in the Digital Age: The Construction of Islamic Identity in Indonesian Political Discourse. *Globalizations*, 19(6), 989–1004. <https://doi.org/10.1080/14747731.2022.2041508>
- Syamsuddin, M., & Hidayat, T. (2023). Literasi Digital Keagamaan sebagai Respons atas Disinformasi Islam di Platform Media Sosial. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(2), 211–236. <https://doi.org/10.22515/al-balagh.v8i2.7891>
- Wahid, A. N., & Bahtiar, E. (2022). Islam, Politics, and Digital Media: Rethinking Public Sphere Theory in the Context of Muslim-Majority Societies. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 315–332. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2094871>